

**PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE
(FINANCIAL TECHNOLOGY)
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Juliatri Nur Jannah

Program Studi Magister Kenotariatan PPS Unisma
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193 Malang
Email: juliatri621@gmail.com

Abstrak

Dengan berkembangnya sistem perekonomian digital, layanan dalam kegiatan pinjam meminjam berkembang sangat pesat salah satunya dengan ditandai adanya layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mana dapat berkontribusi terhadap nilai pembangunan dan perekonomian nasional. Terutama dalam menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karir baru dalam pekerjaan manusia. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keabsahan dan akibat hukum dari perjanjian pinjam meminjam uang secara online (*financial technology*) perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Persoalan yang paling penting dalam suatu hukum perjanjian atau kontrak adalah dalam menentukan keabsahannya, perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan dalam hukum islam suatu akad dikatakan sah apabila jika memenuhi syarat dan rukun dan tidak mengandung *riba*, *gharar*, *tadlis*, *maysir*, dan *dharar*.

Kata Kunci: perjanjian, uang, Islam, teknologi, keabsahan, persyaratan

Abstract

*The development of the digital economy system, the service activities a loan to borrow developed very rapidly, one of which is marked with a money-lending service based on information technology which can contribute the value of development and national economy. Especially in creating new business types and opportunities, as well as creating new types of jobs and careers in human work. Then the research aims to analyze how the validity and legal consequences of the agreement a loan to borrow the money online (Financial technology) perspective of civil law and Islam law. The most important issue in a legal agreement or contract is to determine its validity, the agreement can be said to be valid if it meets the requirements stipulated by article 1320 of the civil law, while in the Islamic laws a contract is said to be valid if it is qualified and not contain *riba*, *gharar*, *tadlis*, *maysir*, and *dharar*.*

Keywords: *certification, land, mediation, state, dispute*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, dengan segala banyak aktivitas dalam kehidupan manusia tidak akan lepas dari perkembangan teknologi. Baik dalam perubahan dibidang sosial, ekonomi, maupun budaya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berubah langsung dengan sangat pesat. Kemajuan dalam perkembangan teknologi ini khususnya dalam bidang finansial memiliki arah yang sangat efisien dan modern. Inovasi teknologi didalam perekonomian dunia saat ini sangatlah penting. Karena antara teknologi dan finansial keduanya memiliki hubungan yang berkaitan. Di era sekarang ini telah hadir teknologi yang mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern dibidang yang bernama "*Financial Technology*". Untuk mendukung perkembangan uang elektronik, pranata hukum mengeluarkan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia sebagai Bank central dan sebagai entitas moneter. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Peraturan ini menjadi bukti nyata bahwa indonesia mengakui adanya uang elektronik di Indonesia.

Berkembangnya model bisnis *e-commerce* tidak hanya dalam sektor ritel pasar untuk produk, akan tetapi dalam layanan transportasi, misalnya seperti gojek, uber, grab, dan dalam layanan keuangan seperti modalku gopay, dan UangTeman. Layanan keuangan ini termasuk bagian dari *financial technology*. Perkembangan dan keberadaannya didukung oleh inovasi teknologi pada bidang, *cloud computing, learning machines, digital and mobile payment, block chain distributed ledgers*, dan *big data*. Layanan keuangan *financial technology* di Indonesia saat ini sedang berkembang dan dibedakan dalam beberapa kelompok, seperti *payment system, digital banking, online/digital insurance, peer-to-peer (P2P)Lending*, dan *crowdfunding*. Berdasarkan data Bank Indonesia, di Indonesia saat ini terdapat 96 perusahaan *financial technology* yang beroperasi.

Dengan ini bisa disimpulkan bahwa dampak pesatnya perkembangan dan keberadaan teknologi dan finansial telah merambah pada industri perdagangan sehingga lahirilah istilah *e-commerce*, otoritas pasar modal terdorong untuk memperkenalkan dan memberlakukan sistem perdagangan secara elektronis yang sangat memungkinkan saham dan efek-efek lainnya tersimpan dalam bentuk

catatan elektronis, begitupula pemindahan haknya berlaku secara elektronis.¹

Layanan.pada.transaksi.teknologi.finansial.mulai.merambah pada layanan keuangan syariah Mengingat Indonesia negara diAsia yang penduduknya terbesar dan mayoritas beragama Islam, maka besar pula potensi untuk mengembangkan transaksi keuangan modern yang berbasis pada syariah, yang mana dalam transaksi syariah tidak boleh ada unsur yang mengandung riba dalam setiap transaksi. Setelah keluarnya fatwa MUI tentang haramnya bunga bank, nyatanya 95% lebih dari penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam masih mengelola keuangan secara ribawi Munculnya teknologi finansial untuk menjawab atas kegundahan-kegundahan yang berkenaan dengan transaksi yang mengandung ribawi Sejak dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, maka ini sebagai bukti bahwa transaksi teknologi finansial syariah menjadi perhatian bagi pemerintah.

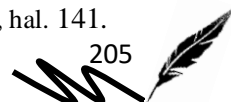
METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis- normatif. Dengan mempertimbangkan dan menitikberatkan pada kepastian hukum yang diperoleh pengguna transaksi pinjam meminjam uang secara online (*financial technology*) dalam perspektif hukum perdata dan hukum islam, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), *literature* dan refrensi yang berhubungan dengan materi pembahasan.² Pendekatan yang digunakan dalam hal penelitian bahan pustaka pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu dengan membandingkan hukum antara undang-undang yang satu dan undang-undang yang lain, antara hukum perdata dan hukum islam. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan primer berupa perundang-undangan, bahan sekunder berupa buku-buku, dan bahan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui cara studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis.

PEMBAHASAN

¹Suratman, *Sekilas Tentang KSEI dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek*, Yurispruden, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 1, No. 2, Januari 2018, hal 94

²Peter Mahmud Merzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 141.



Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online (*Financial Technology*) Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung merupakan praktek yang berlangsung ditengah masyarakat dalam bentuk perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana diatur pada peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini masyarakat sangat berminat dalam pinjam meminjam karena adanya pendanaan yang cepat dan karena sebab suatu hal tertentu keuangan konvensional tidak dapat melayani contohnya dalam perbankan, pasar modal atau perusahaan pembiayaan. Dalam perekonomian pasti menimbulkan kemanfaatan, maka adapula kerugian yang dialami begitupun dampak yang secara langsung akan menjadi tanggung jawab dari para belah pihak yang bersepakat.

Suatu bentuk perjanjian pinjam meminjam uang memiliki kekhususan sendiri dikarenakan objek perjanjiannya berada pada ruang cyber atau dunia maya. Maka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi merupakan suatu perjanjian yang mana satu orang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk dapat memberikan pinjaman yang berupa uang melalui website pemberi pinjaman yang disebut dengan kreditur kepada penerima pinjaman atau debitur. Faktor utama yang menimbulkan perjanjian atau perikatan adalah adanya faktor prestasi yang bernilai uang dan maksud atau tujuan para pihaklah yang melahirkan suatu perjanjian.

Dengan berkembangnya perekonomian digital pada saat ini, masyarakat telah berupaya dalam mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang mana dapat ditandai dengan adanya layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dinilai sangat berkontribusi bagi pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi telah mengubah masyarakat untuk menciptakan jenis-jenis dan peluang bisnis yang baru, serta dapat menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia.

Sebelum adanya peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpegang teguh pada Kitab Undang-Undang Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai perlindungan hukum, seperti halnya dijelaskan pada Pasal 1313 yang menerangkan bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.³ Dari Pasal 1313 Kitab Undang-

³J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 17

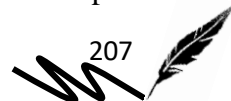
Undang Hukum Perdata dapat ditelaah bahwa unsur-unsur perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya para pihak
- b. Adanya persetujuan anantara pihak yang terikat
- c. Memiliki tujuan yang akan dicapai
- d. Memiliki prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Memiliki syarat-syarat perjanjian tertentu

Dari unsur-unsur tersebut penulis mengelompokkan menjadi beberapa kelompok unsur, diantaranya adalah:

- a. Unsur *essensialia*, jika dianalisis maka sangat jelas suatu perjanjian wajib menimbulkan prestasi-prestasi yang dilaksanakan oleh para pihak sehingga dapat mencerminkan tujuan dan maksud dari pinjam meminjam uang secara *online* tersebut. Tanpa adanya prestasi maka unsur *essensialia* tidak dapat terpenuhi. Akan tetapi, pada layanan pinjam meminjam uang secara *online* telah sangat jelas menjadikan pihak kreditur yang berprestasi memberikan jumlah uang pinjaman dan debitur berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut.
- b. Unsur *naturalia*, pada unsur ini, secara implisit pembebanan berupa kewajiban diberikan kepada pihak penjual dan pembeli berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dengan mana kreditur memberikan jaminannya secara otomatis bahwa besaran pinjaman yang diberikan adalah sesuai dengan apa yang diperjanjikan tanpa adanya cacat maupun hal-hal yang merugikan pihak debitur.
- c. Unsur *aksidentalialia*, dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah menempatkan cara-cara baru dalam melakukan transaksi yang mana bentuk pinjam meminjam uang diatur secara eksplisit dalam KUHPdt, karena objek berada pada dunia maya. Sehingga para pihak untuk melakukan penyerahan (*levering*) menggunakan cara yang disepakati oleh para pihak, mulai dari pembukaan alamat URL, pengisian data diri, pemberian nomor verifikasi dan pencairan dana pinjaman yang berjalan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Penentuan keabsahan dalam suatu perjanjian atau kontrak sangatlah penting, karena keabsahan suatu perjanjian menjadi tolak ukur dalam sistem perjanjian di Indonesia yang harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdt. Pasal 1320 KUHPdt sudah memberikan patokan umum tentang bagaimana perjanjian itu lahir. Dalam Pasal tersebut perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang sudah ditentukan, agar para pihak dapat



melahirkan hak-hak dan kewajiban yang sah sesuai syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Untuk mewujudkan suatu keabsahan dalam perjanjian terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

a. Sepakat

Kesepakatan telah diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt, sebagaimana penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Perjanjian yang dibuat berdasarkan penawaran dan penerimaan yang dilakukan secara *online*. Dalam transaksi *online* tersebut terjadi proses penawaran dan penerimaan secara tidak langsung *face to face*, karena para pihak tidak berada pada satu tempat yang sama bahkan para pihak berada pada lintas negara. Pada saat ini, perjanjian lahir apabila pihak yang ditawarkan telah menyatakan penerimaannya melalui suatu tulisan, tulisan ini termasuk pada surat elektronik (*electronic mail* atau *e-mail*)

b. Cakap

Dapat kita artikan yang sudah dewasa dan tidak dalam pengampunan. Selain dua syarat diatas, berdasarkan ketentuan hukum Indonesia harus ditambah dengan ketentuan tidak dil;arang oleh undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1329 KUHPdt bahwa setiap oraang cakap untuk melakukan perbuatan perjanjian, apabila oleh undang-undang tidak dinyatakan secara jelas cakap.

c. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdt adalah suatu kewajiban debitur dan hak kreditur, berarti bahwa hal tertentu adalah suatu apa yang dijanjikan, yaitu hak dan kewajiban kedua pihak.

d. Suatu Sebab yang halal

Pada setiap perjanjian wajib berdasarkan dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Setiap perjanjian terdapat dua macam tipe subjek, subjek pertama adalah seseorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan subjek kedua adalah manusia atau suatu badan hukum yang mendapatkan hak pada pelaksanaan kewajiban itu. Subjek berupa manusia wajib memenuhi syarat umum untuk melakukan suatu perbuatan hukum secara sah yaitu dewasa, pikiran yang sehat, dan tidak olehj peraturan hukum dilarang atau dibatasi dalam melakukan perbuatan yang sah, seperti aturan pailit.

Objek kebalikan dari subjek, sesuai penjelasan diatas dapat kita ambil titik terang bahwasanya subjek dalam perjanjian adalah yang bertindak aktif, dalam hal ini platform penyelenggaraan bertindak aktif

sebagai kreditur, adapun orang yang membutuhkan pinjaman disebut pihak debitur.

Ketidaklengkapan yang berhubungan dengan syarat subjektif hanya akan berdampak pada pembatalan perjanjian. Selama perjanjian belum disampaikan pembatalannya kepada pengadilan yang berwenang maka suatu perjanjian masih tetap sah. Kemudian, jika ketidaklengkapan itu bersangkutan pada syarat objektif maka dapat mengakibatkan batal demi hukum. Disini menjelaskan bahwa perjanjian sejak pertama kali dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian tidak pernah lahir sebelumnya.⁴

Pada pelaksanaan layanan pinjam meminjam secara online, perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum lahir dari hubungan antara para pihak, baik pihak pemberi pinjaman, penerima pinjaman maupun penyelenggara layanan teknologi finansial berbasis *peer to peer lending*. Hubungan hukum ini diatur dalam Pasal 18 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur tentang Perjanjian yang terjadi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Bentuk dari suatu kesepakatan yang terjadi antara pemberi pinjaman atau pemberi kuasa dengan penyelenggara selaku penerima kuasa adalah pada saat pemberi pinjaman bersepakat atau setuju dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh *platform* penyelenggara yang diikuti bersama dengan pernyataan kehendak. Pernyataan tersebut dilakukan dengan cara cara menekan tombol persetujuan berupa mengklik centang pada *platform*. Pada praktek penyelenggara teknologi finansial berbasis *peer to peer lending*, dalam pelaksanaan operasional perusahaan mendapatkan upah berupa *fee* atas jasa yang tersedia oleh Penyelenggara *platform* teknologi finansial berbasis *peer to peer lending*.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan harus patuh dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19 dan Pasal 20 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengenai syarat umum bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, dan ketentuan umum dari kedua perjanjian diatas wajib dituangkan didalam suatu dokumen elektronik.

Mekanisme pinjam meminjam melalui *platform peer to peer lending* dilakukan dengan cara, penyelenggara layanan mempertemukan penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman/investor melalui aplikasi yang tersedia oleh penyelenggara layanan dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat luas, disini *platform* layanan bukanlah sebagai kreditur, hingga tidak

⁴Ridwan Khairady, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hal. 191-192.

mendapatkan bunga dan tidak pula menahan modal pengguna layanan sebagai pengganti apabila terjadi gagal bayar.⁵

Perjanjian secara *online* atau elektronik telah diletakkan dalam dokumen elektronik. Pasal 1 Angka 12 POJK Nomor77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa “Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima, serta disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu dan memahaminya sebagai mana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada mekanisme perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman para pihak tidak perlu saling bertemu dan saling bertatapmuka (*face to face*). Setiap bentuk kegiatan dihubungkan dengan bantuan penyelenggara layanan teknologi finansial berbasis *peer to peer lending*. Penyelenggara teknologi finansial disini sebagai perantara perantara bagi para pihak pengguna *platform* teknologi finansial. Perjanjian secara *online* melahirkan suatu hubungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, para pihak tersebut dihubungkan dengan hubungan kontraktual yang dilakukan oleh para pihak. Para pihak harus patuh pada apa yang telah mereka janjikan sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dari hubungan kontraktual tersebut timbulah suatu hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. Dalam garis besar pemberi pinjaman wajib memberikan dana sebesar apa yang dijanjikan pada batas waktu yang ditentukan. Dari kewajiban timbulah hak yaitu pengembalian dana beserta bunga yang dijanjikan dengan penerima pinjaman. Sebagai penerima pinjaman berhak atas mendapatkan pinjaman dana yang sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan. Dari hak tersebut menimbulkan pula kewajiban yang harus dilakukan yaitu dengan membayar dana yang dipinjamkan beserta bunga yang diperjanjikan, selain itu penerima pinjaman juga wajib membayarkan *fee* jasa *platform* penyelenggara.

Mengenai jumlah ganti rugi yang tertuang wajib dibayar suatu bunga, yang ditetapkan sebanyak 6 (enam) persen setahun dinyatakan dalam Pasal 1603q KUHPdt. Dan dalam Pasal 1767 KUHPdt tentang

⁵Arief Syaifudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending (Studi Kasus di PT Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*, Dinamika, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 26, No. 4, Februari 2020, hal. 414

diperbolehkannya memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaiannya. Bunga yang dijanjikan dalam perjanjian itu boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala yang tidak dilarang.

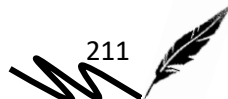
Mengenai batasan maksimum pemberian bunga pinjaman uang atau barang lain yang habis pakai Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya tidak mengatur secara spesifik. Hal tersebut dapat menitikberatkan kepada debitur dalam pelunasan pinjaman uang dan tidak sesuai dengan tujuan dan maksud awal dari adanya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga Penawaran Antar Bank tidak mengatur secara jelas pastinya mengenai jumlah besaran untuk pinjaman uang tanpa agunan. Pada dasarnya Otoritas Jasa Keuangan juga tidak memberikan aturan baku mengenai besaran Suku Bunga Wajar (SBW) produk Kredit Tanpa Angunan (KTA), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengatur tinggi suku bunga kredit untuk debitur dikarenakan hal tersebut diserahkan kepada mekanisme pasar dan kebijakan masing-masing Bank.

Perlu adanya yang menjadi titik terang aturan pada standarisasi bunga wajib, dengan mengacu pada POJK Nomor. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi khususnya pada Pasal 17 ayat (1) yang menerangkan bahwa penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional, dapat ditelaah bahwa dalam penentuan bunga perjanjian kredit antara debitur dan krediturnya hanya mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional, sehingga kata “kewajaran” memiliki makna yang sangat luas sehingga dapat mengakibatkan kekaburan norma, disini perlu adanya penjelasan terkait dengan kata “kewajaran” agar dapat menciptakan kepastian hukum didalam masyarakat.

Sejalan dengan berkembangnya teknologi finansial konvensional berkembang pula dalam teknologi finansial syariah. Jelas akan terdapat perbedaan-perbedaan antara teknologi finansial syariah dan teknologi finansial konvensional. Transaksi yang digunakan harus sesuai dengan aturan-aturan syariah baik dari segi rukun dan syaratnya dalam akad perjanjian. Munculnya teknologi finansial selaras dengan adanya perubahan pada teknologi yang semakin maju sehingga dengan perkembangan zaman gaya hidup manusia juga ikut berubah seiring.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis



Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini dilakukan karena layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar dapat memperoleh akses pendanaan lebih cepat, mudah dan efisien saat ini semakin berkembang dengan adanya sarana teknologi finansial syariah. Dengan ini masyarakat Indonesia perlu adanya penjelasan mengenai ketentuan, kepastian dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Karenanya, DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk menjadi pedoman bagi masyarakat. Seperti halnya Pembiayaan berbasis teknologi (*fintech*) syariah yaitu pembiayaan anjak piutang (*factoring*), pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* (*seller online*), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, pembiayaan untuk pegawai (*employee*) dan pembiayaan berbasis komunitas (*community based*)

Adapun Akad yang digunakan pada layanan pembiayaan berbasis teknologi (*fintech*) syariah adalah akad jual beli, *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *qard*, *wakalah*, dan *wakalah bil ujah*. Akan tetapi, setiap pembiayaan menggunakan akad yang berbeda dengan pembiayaan yang lainnya.

Nilai agama dalam bidang ekonomi dapat dilihat dengan adanya hukum halal dan haram yang harus diperhatikan mulai dari ketentuan hingga perkara yang dapat mempengaruhi suatu hal tersebut. Permisalan yang telah disajikan sebelumnya terkait akad-akad diatas merupakan *muammalah* yang halal. Sedangkan akad utang piutang dengan riba adalah *muammalah* yang haram. Banyak perkara yang bisa menjadikan suatu akad yang pada dasarnya halal bisa menjadi haram apabila dalam transaksi tersebut mengandung unsur haram atau tidak sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada suatu permisalan seseorang memperdagangkan barang-barang haram dan atau ilegal (*khamr*, narkoba dan lain sebagainya). Permisalan lain adalah ketika seseorang melakukan transaksi yang didalamnya mengandung unsur penipuan.

Suatu transaksi syariah dapat dikatakan sah apabila berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Segala bentuk perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah adalah untuk melindungi hak individu yang harus dijaga sekaligus untuk menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat. Sebenarnya, akad yang terdapat dalam teknologi finansial tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, bilamana tidak melanggar prinsip

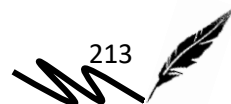
syariah. Selain itu, teknologi finansial merujuk kepada salah satu asas *muammalah* yaitu *an-taradhin* yang memiliki arti saling ridho atau bisa dikatakan mufakat antara kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan bersepakat. Dua asas inilah yang menjadi tolak ukur atas sah nya suatu transaksi.

Dibidang *muammalah* terdapat suatu asas hukum Islam yaitu asas kebolehan atau *mubah*. Asas ini menerangkan bahwa boleh melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan *muammalah*) selama tidak bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini memberikan cerminan bahwa Islam memberikan kemudahan hak kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam-macam hubungan keperdataan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia sebagaimana dalam firman Allah pada Surat Al-Baqarah Ayat 185 yang berbunyi: “.....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....”

Perjanjian pinjam meminjam secara online dapat kita ketahui apakah perjanjian bertentangan atau tidak dari segi hukum perikatan Islam, maka perjanjian harus sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum perikatan Islam. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad adalah, suatu subjek perikatan harus akil baligh (dewasa dan berakal sehat) serta bebas dari tekanan dan paksaan (*mukhtaar*) dari pihak lain (sukarela). Ini adalah syarat utama yang mutlak harus terpenuhi bagi para pihak yang akan melakukan perikatan Islam. Untuk objek, yang harus memenuhi syarat objek akad yaitu telah ada pada waktu akad dilaksanakan, dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat atau tidak mengandung ke-*mudharatan*), harus jelas dan diketahui, serta dapat diserahkan.

Dalam segi perikatan sesuai hukum Islam atau sesuai syariah, kontrak yang dilaksanakan melalui model sistem teknologi informasi tetap harus sesuai dengan rukun dan syarat akad. Pada Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas, yaitu:

- a. *Iktiyari*/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, tidak boleh adanya unsur keterpaksaan atas tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah*/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- c. *Iktiyati*/kehati-hatian; setiap akad harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.



- d. *Luzum*/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dengan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- e. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga mencegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Tsawiyah*/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi, setiap akad dengan pertanggungjawaban para pihak yang seimbang.
- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir*/Kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya.
- j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram

Pada Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang menggunakan akad syariah memberikan beberapa pilihan kepada para pengguna layanan baik itu peminjam maupun pihak yang memberikan pinjaman. Peminjam maupun pemberi pinjaman diberikan skema sesuai kebutuhan mereka namun tetap sesuai koridor syariah. Penerapan skema pada syariah yang dilakukan penyelenggara wajib memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator agar memberikan pelayanan yang maksimal serta perlindungan dan kepastian bagi pengguna layanan.

Teknologi finansial *peer to peer lending* berbasis syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan dan menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Subyek hukum teknologi finansial *peer to peer lending* ada tiga pihak, yaitu penyelenggara, pemberi pembiayaan, dan penerima pembiayaan. Berdasarkan prinsip syariah dalam Fatwa DSN-MUI Teknologi finansial *peer to peer lending* dapat dilakukan dengan beberapa model diantaranya adalah: pembiayaan anjak piutang, pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online,

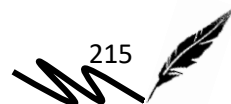
pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui *payment gateway*, pembiayaan untuk pegawai, pembiayaan berbasis komunitas. Mekanisme pelaksanaannya adalah dengan adanya dua akad terpisah dalam setiap model, yaitu: *pertama*, antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan, *kedua*, antara penyelenggara dengan penerima pembiayaan. Penyelenggara dengan pemberi pembiayaan menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, sedangkan antara penyelenggara dengan penerima pembiayaan bisa menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, atau *qardh* sesuai dengan model yang digunakan.

Agama Islam tidak memberikan kesusahan kepada umatnya karena Allah tidak pernah membebani makhluknya kecuali sesuai dengan kemampuannya, justru Islam selalu menghendaki kemudahan bagi seluruh pemeluknya terbukti dalam QS Al-Baqarah Ayat 185 tersebut. *financial technology* dimaksudkan untuk mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan. Maka dari itu teknologi finansial dapat diterapkan dalam ekonomi Islam. *financial technology* di mata ekonomi Islam memang menguntungkan dan banyak manfaat di masa milenial ini. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman harus pandai memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik dan bijak sehingga dapat bermanfaat bagi pribadi maupun orang lain di sekitar keberadaannya.

Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online (*Financial Technology*) Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

Perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* dapat dikatakan sah manakala persyaratan yang telah ditetapkan oleh pasal 1320 KUHPdt *Juncto* Pasal 1313 KUHPdt terpenuhi. Sehingga berlaku bagi mereka yang mengikatkan dirinya, maka tidak boleh ditarik kembali tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup dalam undang-undang, dan harus dilakukan dengan itikad baik

Perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* memiliki kekuatan mengikat, memaksa dan memberi kepastian hukum kepada pihak yang membuatnya, sehingga perjanjian ini berlaku sebagai undang-undang. Oleh karenanya pihak yang telah mensepakati harus mentaati isi didalamnya, hal ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Apabila ada pihak yang melanggar perjanjian, artinya ia telah dianggap melanggar undang-undang, sehingga berhak mendapatkan sanksi hukum.



Suatu perjanjian jelas harus disertai dengan asas kebebasan berkontrak, karena setiap perjanjian yang dimuat secara sah dan mengikat kepada para pihak sebagai undang-undang, hal ini sesuai dengan adanya Pasal 138 ayat (1) KUHPdt. Dimana objektifitas pada nilai pelaksanaan perjanjian ini dapat diukur, apakah pelaksanaan perjanjian sesuai dengan syarat sah perjanjian dan apakah dapat mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Nyatanya, dengan perkembangannya kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan.

Kebebasan berkontrak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan telah dibatasi oleh hukum perjanjian di Indonesia. Pembatasan ini dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPdt khususnya pada suatu sebab yang halal dalam kontrak. Berdasar pada Pasal 1337 KUHPdt suatu kausa dapat menjadi terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 1339 KUHPdt menjelaskan, bahwa suatu perjanjian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 1339 KUHPdt itu, dapat dilihat bahwa meskipun di dalam suatu kitab undang-undang yang sudah begitu lengkapnya seperti KUHPdt, namun factor “kebiasaan” masih juga mempunyai peranan yang amat penting dalam lalu lintas hukum.

Namun harus ada yang diperhatikan dalam suku bunga pinjaman karena terdapat kekosongan norma pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Teknologi Informasi pada Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. Dalam suku bunga, kredit yang diberikan kepada konsumen dibuat sebagai akad pinjaman sehingga nasabah nantinya memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang ditentukan oleh peminjam (fintech konvensional), tergantung pada besarnya pinjaman yang diambil. Diperhatikan pula pada resiko cicilan karena ketika nasabah mengajukan pinjaman secara konvensional, nasabah akan menanggung sepenuhnya resiko ketika nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar cicilannya.

Suku bunga pinjaman yang tinggi dapat batal demi hukum berdasarkan *Woeker Ordonnantie* 1938, jika hanya mempertimbangkan kewajaran yang disebut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Teknologi Informasi pada Pasal 17 ayat (1). Sesuai dengan pendapat J. Satrio yang mana persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas

dinyatakan didalamnya, akan tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan dan undang-undang.

Dewasa ini banyak ditemukan sarana yang melayani perjanjian pinjam meminjam uang secara online. Namun ada keraguan dalam kehalalan transaksi tersebut. Menilik kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, perjanjian pinjam meminjam uang secara online dibolehkan. Namun tentu sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud dalam fatwa tersebut adalah, transaksi tersebut harus terhindar dari hal-hal yang mnegharamkannya, yaitu *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, dan *haram*. Akad baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*. Dalam transaksi ini, harus disertakan bukti transaksi yang sah untuk menghindari kerugian dalam transaksi tersebut. Bukti transaksi itu dapat berupa sertifikat elektronik yang disahkan keasliannya melalui validasi oleh pengguna dengan membubuhkan tanda tangan elektronik yang sesuai ketentuan. Transaksi juga harus dengan jelas dan transparan menyampaikan yang ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan syariah. Penyelenggaraan layanan peminjaman ini diperbolehkan memasang tarif (*ujrah*) namun dengan ketentuan menggunakan prinsip *ijarah*.

Dengan berdasarkan ketentuan dan prinsip syariah yang ditetapkan dalam perjanjian utang piutang secara online (perbuatan hukum perdata), maka transaksi tersebut tidak ada bedanya dengan perjanjian utang piutang yang dilakukan secara umum atau offline seuai dengan ketentuan hukum perdata. Transaksi online yang muncul dewasa ini tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam, degan syarat tidak menyalahi Hukum Perikatan Islam. Maka, perjanjian pinjam meminjam dalam fintech berbasis Peer to Peer Lending tersebut disa dinyatakan sah selama masih berpegang pada hukum Islam dan ketentuan syariat, sehingga tidak dinyatakan bertentangan dengan keduanya karena kemunculannya yang baru ini.

Dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN/MUI/II/2018 suoaya terhindar dari *riba*. Sedangkan di dalam bunga pinjaman terdapat unsur *riba*, maka bunga merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Kenyataan ini menjadikan sedikit perbedaan pada pembiayaan keungan syariah. *Riba* yang mmeiliki beragam bentuk ini, dalam penerapan prinsip syariah dengan tegas telah dilarang oleh Allah yang dinyatakan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi "*hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman. Kalau kamu tiada*



memperbuatnya ketahuilah ada peperangan dari Allah dan Rasul-Nya terhadapmu dan jika kamu bertobat maka untukmu pokok-pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya.”

Berbagai golongan dan agama telah sepakat mengecam diberlakukannya bunga (riba) dalam pinjaman. Akan tetapi, bagi hasil adalah sesuatu yang diperbolehkan. Sehingga berbagai golongan dan agama tidak mngecam metode ini. Kedua hal ini (bunga dan bagi hasil), konteksnya sangat berbeda, baik pada sistem ekonomi konvensional dengan sitem bagi hasil (ujrah) pada sitem ekonomi Islam, antara lain :

- a. Perjanjian bunga dibuat pada waktu kontrak dengan asumsi harus selalu menguntungkan bagi pemberi pinjaman, sedangkan bagi hasil dibuat pada waktu kontrak dengan mengantisipasi pada kemungkinan-kemungkinan untung dan ruginya,
- b. Besarnya presentase Bunga disandarkan pada jumlah uang yang dipinjam, sedagkan presentase bagi hasil disandarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh nanti,
- c. Bunga tidak mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut untung ataukah rugi, sedangkan bagi hasil keuntungan dan kerugian dalam suatu usaha ditanggung secara bersama-sama

Dalam pembiayaan syariah, tidak akan menjumpai kredit yang diberikan akad sebagai pinjaman melainkan dengan akad *murabahah*, *ijarah wa iqtina*, serta *musyarakah mutanaqishah*. Masing-masing akad tersebut pastinya memiliki tata cara pengaturan yang berbeda. Terutama pada resiko dan cicilan akad pembiayaan syariah kedua belah pihak baik teknologi finansial ataupun nasabah akan menanggung resiko secara bersama. Terdapat sedikit perbedaan anatara pembiayaan dengan akad syariah dan perjanjian konvensional dalam penyediaan dana pinjaman. Akad pembiayaan syariah dengan menggunakan penawaran produk-produk untuk keperluan para kehendak. Dalam pembiayaan konvensional tidak terdapat penawaran seperti haji dan umroh, pendidikan, ataupun lainnya.

Secara matematis tata cara pembiayaan konvensional dan syariah terlihat sangat mirip, akan tetapi secara prinsipil keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mencolok. Dari penelitian diatas penulis dapat membandingkan anatara keabsahan dan akibat hukum dari suatu perjanjian pinjam meminjam uang secara *online (financial technology)* dari segi hukum perdata dan hukum islam, akan tetapi pada dasarnya sistem perjanjian yang digunakan dalam pembiayaan syariah ataupun konvensional mengandung sistem yang sama, keduanya menggunakan teknologi yang bergerak dalam sistem keuangan, dengan pembiayaan yang ditawarkan bersifat umum atau diperuntukkan kepada siapa saja yang membutuhkan modal usaha.

Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara *online* perspektif hukum perdata dapat dikatakan “sah” apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPdt *Juncto* Pasal 1313 KUHPdt. Berpayung pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.

Sedangkan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online perspektif hukum islam dikatakan sah pula jika syarat dan rukunnya terpenuhi, berpayung hukum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip Syariah.

KESIMPULAN

Akibat hukum dari Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online dalam prespektif Hukum Perdata dan Hukum Islam memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para kehendak sebagaimana perjanjian pada umumnya. tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan adanya kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Namun ada yang harus diperhatikan yaitu suku bunga dari keduanya karena dengan suku bunga yang tinggi perjanjian dapat di batalkan demi hukum, dan dalam hukum islam tidak mengenal suku bunga karena didalamnya mengandung riba.

Terkait dengan Suku Bunga Wajar bagi pinjaman dan teknologi finansial pemerintah melalui Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan diharapkan segera memberikan atau membuat peraturan mengenai pembatasan bunga pinjaman. Dengan adanya penetapan suku bunga penawaran antarbank dapat meminimalis kompleksitas kontrak keuangan untuk mendorong standarisasi penggunaan suku bunga acuan pada surat utang dan/atau pinjaman dengan suku bunga yang sangat tinggi. Selain itu, pemerintah harus memastikan wewenang pengawasan dan memberikan perlindungan bagi pengguna dan penyelenggara financial technology secara pasti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.



Peter Mahmud Merzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Jakarta.

Ridwan Khairady, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press),

Jurnal

Arief Syaifudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending (Studi Kasus di PT Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*, Dinamika, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 26, No. 4, Februari 2020.

Suratman, *Sekilas Tentang KSEI dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek*, Yurispruden, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 1, No. 2, Januari 2018.

Internet

Muhammad Iqbal, *Sharia Economics*, Republika, Jakarta, 2013, hal. 276, akses 18 Mei 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengenai syarat umum bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik